

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan tentang suatu fenomena antara pemegang saham (principal) dan manajer perusahaan (agent) atas perbedaan kepentingan Jansen dan Meckling (1976:5) pada (Meiriasari 2017). Pemegang saham yang sebagai principal memberikan kewenangan kepada manajer perusahaan yang bertindak sebagai agent untuk melakukan operasional perusahaan, maka hal tersebut menimbulkan ketimpangan informasi atau yang sering disebut dengan asimetri informasi karena manajer perusahaan mendapatkan informasi tentang perusahaan yang lebih banyak dibandingkan dengan pemegang saham yang kemungkinan besar manajer dapat melakukan manipulasi data dalam informasi yang didapatkan sehingga hal tersebut yang tidak diinginkan oleh pemegang saham (Swissia 2018).

Keadaan di dalam perusahaan yang benar terjadi hanya diketahui oleh manajer perusahaan karena manajer berada di perusahaan tersebut untuk mengelola perusahaan sedangkan pihak pemegang saham akan memperoleh informasi yang sedikit karena tidak sering ada diperusahaan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa asimetri informasi merupakan suatu kondisi dimana informasi yang diberikan kepada

pemegang saham berbeda dengan informasi yang didapatkan oleh manajer perusahaan karena adanya kepentingan yang berbeda. Maka perbedaan kepentingan antara kedua pihak tersebut akan menimbulkan sebuah konflik keagenan.

Menurut Eishenhard (1989) pada Meiriasari (2017) teori keagenan digunakan untuk mengatasi dua permasalahan yang terjadi pada hubungan keagenan yaitu yang pertama adanya perbedaan kepentingan maupun tujuan antara *agent* dan *principal* dimana hal tersebut menyulitkan *principal* dalam pengambilan keputusan. Permasalahan kedua yaitu adanya perbedaan dalam sikap menghadapi risiko. Penerapan *Corporate governance* merupakan respon dari perusahaan untuk dapat mengatasi konflik keagenan yang diharapkan akan memberikan kepercayaan kepada manajer perusahaan dalam mengelola sumber pendanaan yang berasal dari pemegang saham.

2.1.2 *Tax Avoidance*

Perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance* dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undang perpajakan dengan tidak melanggar aturan perpajakan. Sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan akan lebih rendah. Menurut Pohan (2016:11) *Tax avoidance* merupakan suatu upaya dimana beban pajaknya diefisiensikan dengan cara menghindari pengenaan pajak yang diarahkan kepada transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Penghindaran pajak merupakan transaksi yang diatur agar mendapatkan keuntungan

maupun manfaat yang secara hukum bersifat legal (Brown 2012) pada (Santosa 2017). Jadi dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan suatu cara yang legal yang digunakan dalam meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan pada ketentuan perpajakan.

Menurut Syahwier dan Fitriani (2017) Penghindaran pajak dengan penggelapan pajak itu berbeda, dimana penghindaran pajak digunakan untuk memperkecil beban pajak dengan mencari celah-celah pada aturan pajak dimana tidak melanggar ketentuan yang berlaku sedangkan penggelapan pajak digunakan untuk memperkecil beban pajak dengan melanggar suatu ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.3 Karakteristik Perusahaan

Karakteristik perusahaan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan pengelompokan suatu organisasi maupun perusahaan menjadi besar maupun kecil sesuai dengan total asset perusahaan tersebut. Hal ini berarti Pengukuran perusahaan menggunakan total asset (Wardani 2018). Semakin besar asset yang dimiliki perusahaan, penjualan, dan juga kapitalisasi pasar maka semakin besar juga ukuran perusahaan tersebut (Syahwier dan Fitriani 2017). Menurut FASB dalam bukunya Suwardjono (2005:252) “Aset adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai maupun dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu”.

Menurut APB dan Ijiri dalam bukunya Suwardjono (2005:253) mendefinisikan bahwa aset merupakan sumber ekonomi, hal tersebut karena di dalam aset terdapat kelangkaan jadi entitas harus mengendalikan transaksi ekonomi dari pihak lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa aset merupakan suatu manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang diperoleh dari perusahaan dan dikendalikan oleh perusahaan tersebut melalui transaksi-transaksi dan kejadian di masa lalu.

2.1.4 Struktur Kepemilikan Keluarga

Struktur kepemilikan keluarga merupakan struktur kepemilikan dimana anggota keluarga mempunyai jabatan di jajaran manajemen tingkat atas pada perusahaan tertentu. Kepemilikan keluarga dalam perusahaan biasanya saling berbagai pengetahuan maupun pengalaman yang pernah dilakukan setiap generasi ke generasi penerusnya. Hubungan yang baik akan terjalin dengan karyawan, pemasok, maupun pihak eksternal jika generasi penerus dalam suatu perusahaan dapat tumbuh maupun mempertahankan perusahaan yang telah dibangun oleh generasi – generasi sebelumnya (Komalasari dan Nor 2014). Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemilikan keluarga maupun perusahaan keluarga selalu berusaha melakukan investasi semaksimal dan seefisien mungkin untuk dapat mempertahankan perusahaannya sampai ke generasi berikutnya. Perusahahaan keluarga dapat berpengaruh pada kualitas laba akuntansi maupun kinerja suatu perusahaan dengan cara memperoleh keuntungan sendiri atau dengan cara keselarasan (Mathova 2017).

2.1.5 Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan suatu keadaan dimana adanya hubungan antara pihak satu dengan yang lainnya yang mempunyai kepentingan dalam hal politik dengan tujuan yang sama untuk mencapai keuntungan dari kedua pihak (Sugiyarti 2017). Salah satu ciri perusahaan yang mempunyai hubungan politik yaitu salah satu pimpinan perusahaan, kerabat dari pimpinan perusahaan maupun pemegang saham perusahaan terkait pernah atau sedang menjabat menjadi petinggi negara maupun adanya hubungan erat dengan pemerintah Faccio dan Mc Connell (2006) pada Amelia (2013). Maka dapat disimpulkan bahwa koneksi politik adalah hubungan antara pihak perusahaan dengan pejabat tinggi Negara yang memiliki tujuan yang sama untuk memperoleh keuntungan yang akan di dapatkan diantara kedua belah pihak.

Menurut Purwanti (2017) adanya perlakuan khusus yang didapat perusahaan dalam hal hubungannya dengan koneksi politik diantaranya yaitu dapat dengan mudah memperoleh pinjaman modal, adanya risiko yang rendah dalam hal pemeriksaan pajak. Menurut Harjan dkk (2019) perusahaan yang mempunyai hubungan politik dapat dimungkinkan untuk memperoleh pembiayaan rendah. Hal tersebut didukung beberapa penelitian diberbagai penelitian yaitu diantaranya di negara Indonesia, Brasil, Taiwan, Pakistan, Amerika Serikat.

2.1.6 Biaya Utang

Biaya utang merupakan tingkat bunga yang diharapkan kreditor dimana perusahaan harus membayar pinjaman yang dilakukan perusahaan tersebut (Fabozzi 2007) pada (Swissia 2018). Menurut Syahwier (2017) Biaya utang adalah ketika perusahaan mempunyai utang dan harus membayar tingkat pengembalian berupa bunga yang diberikan kepada kreditor dari perusahaan sampai utang tersebut dapat terselesaikan atau lunas. Maka dapat ditarik kesimpulan dari pengertian diatas, bahwa biaya utang dapat dikatakan sebagai biaya yang disebabkan oleh utang yaitu berupa bunga. Biaya utang atau *Cost Of Debt* merupakan elemen penting pada struktur modal yang berpengaruh pada faktor pajak dan utang pajak, yang dimana beban bunga bisa digunakan untuk pengurangan pajak terutang (Masri dan Martani 2014).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Wardani dan Rumahorbo (2018)	Pengaruh Penghindaran Pajak, Tata Kelola dan Karakteristik Perusahaan terhadap Biaya Utang	<i>Tax avoidance</i> tidak berpengaruh terhadap biaya utang. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap biaya utang. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap biaya utang. Komite audit tidak berpengaruh terhadap biaya utang.

			Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya utang.
2.	Santosa dan Kurniawan (2017)	Analisis Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> terhadap Cost of Debt pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Selama Periode 2010 – 2014	<i>Tax avoidance</i> berpengaruh positif signifikan terhadap biaya utang.
3.	Rebecca dan Veronica (2013)	Pengaruh <i>Corporate Governance Index</i> , Kepemilikan Keluarga, dan Kepemilikan Institusional terhadap Biaya Ekuitas dan Biaya Utang: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI	<i>Corporate Governance Index</i> memiliki pengaruh negatif terhadap biaya ekuitas dan biaya utang perusahaan. Kepemilikan keluarga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap biaya ekuitas perusahaan. Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang. Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya ekuitas. Kepemilikan institusional terbukti berpengaruh signifikan negative terhadap biaya utang.
4.	Swissia dan Purba (2018)	Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Keluarga, Pengungkapan Sukarela dan Leverage terhadap Biaya Utang	Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap biaya utang perusahaan. Pengungkapan sukarela, <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang.

5.	Perdana dan Kusumastuti (2012)	<i>Analysis of The Impacts of Family Ownership on a Company's Costs of Debt</i>	Kepemilikan keluarga berpengaruh positif signifikan terhadap biaya utang. Kepemimpinan oleh CEO atau ketua pendiri tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan biaya utang.
6.	Ashkhabi dan Agustina (2015)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Struktur Kepemilikan Perusahaan dan Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Utang	<i>Corporate Governance index</i> dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap biaya utang. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap biaya utang. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap biaya utang.
7.	Amelia dan Veronica (2013)	Analisis Pengaruh Hubungan Politik dan Kepemilikan Keluarga terhadap Biaya Utang dan Biaya Ekuitas (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI)	Hubungan politik memiliki pengaruh signifikan positif terhadap biaya utang perusahaan. Hubungan politik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya ekuitas perusahaan. Kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya utang dan biaya ekuitas perusahaan. Hubungan politik yang dimiliki perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga dapat berpengaruh positif pada kepemilikan keluarga terhadap biaya utang. Hubungan politik yang dimiliki perusahaan dengan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap biaya ekuitas perusahaan.

8.	Harjan dkk (2019)	<i>Political Connections and Cost of Debt Financing: Empirical Evidence from China</i>	Hubungan negatif dan signifikan antara biaya utang dan perusahaan yang mempunyai hubungan politik. Hubungan negatif antara biaya utang dan direksi yang mempunyai hubungan politik.
9.	Masri dan Martani (2014)	Tax Avoidance Behavior Towards the Cost of debt	<i>Tax avoidance</i> berpengaruh positif pada biaya utang. Struktur kepemilikan keluarga menyebabkan pengaruh yang besar terhadap penghindaran pajak pada biaya utang sehingga kepemilikan keluarga meningkatkan perilaku agresif pajak.
10.	Meiriasari (2017)	Pengaruh <i>Corporate governance</i> , Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan (<i>Firm Size</i>) terhadap Biaya Utang	<i>Corporate governance</i> , kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan (<i>firm size</i>) berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya utang. Kepemilikan keluarga tidak mempunyai pengaruh terhadap biaya utang.
11.	Ifada dan Yunandriatna (2017)	Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Kebijakan Utang Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014)	<i>Free cash flow</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan utang. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan utang. Kebijakan deviden berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan utang. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan utang.

12.	Novianti (2014)	Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Utang (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012)	Penghindaran pajak tidak berpengaruh positif terhadap biaya utang dikarenakan perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian lebih menyukai sumber pendanaan internal yaitu modal dan laba dibandingkan sumber pendanaan eksternal berupa utang.
13.	Sadjiarto dkk (2019)	Kepemilikan Saham sebagai Determinan atas <i>Cost of Debt</i>	Berdasarkan hasil pengujian penelitian ini dapat disimpulkan bahwa <i>tax avoidance</i> memiliki pengaruh terhadap <i>cost of debt</i> . Untuk hasil pengujian variabel moderasi terhadap <i>cost of debt</i> hanya satu dari tiga variabel penelitian yang terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>cost of debt</i> yaitu <i>institutional ownership</i> . Sedangkan <i>family ownership</i> dan <i>public ownership</i> tidak berpengaruh terhadap <i>cost of debt</i> . Hasil pengujian variabel kontrol dari penelitian ini adalah variabel <i>age</i> , <i>leverage</i> dan <i>size</i> memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap COD. Sedangkan variabel CFO berpengaruh positif signifikan terhadap COD.
14.	Nuraina (2012)	Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Utang dan Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI)	Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan kebijakan utang perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan utang perusahaan

15.	(Sutarti, Andini, dan Pranaditya (2018))	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak terhadap Biaya Utang dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI penelitian tahun 2012-2016)	Ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit dan penghindaran pajak secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya utang. Kepemilikan institusional memoderasi antarakur dan dewan komisaris dengan biaya utang, sedangkan kepemilikan institusional memoderasi antara komite audit dengan biaya utang. Kepemilikan institusional memoderasi antara penghindaran pajak dengan biaya utang
-----	--	--	--

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Biaya Utang

Perusahaan meminimalisir pajak yang dibayarkan kepada negara dengan memanfaatkan *tax avoidance*. Cara pemanfaatan *tax avoidance* yaitu dengan mencari celah peraturan pajak tanpa harus melanggar aturan pajak tersebut. Perusahaan juga dapat memanfaatkan biaya utang dalam pemanfaatan *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan pajak yang dibayarkan perusahaan akan berkaitan dengan sumber pendanaan di perusahaan.

Perusahaan menggunakan sumber dana dari pihak eksternal berupa utang. Maka hal tersebut dapat meminimalisir pajak yang dibayarkan, karena penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis akan

dikurangi dengan biaya utang yang dimiliki oleh perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan kepada Negara akan lebih rendah.

Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yaitu tarif pajak yang dihitung dengan cara membandingkan beban pajak dan laba sebelum pajak. Menurut Santoso (2017) hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa ETR berpengaruh negatif terhadap biaya utang, karena ETR mempunyai hubungan terbalik dengan *tax avoidance*. Maka *tax avoidance* yang semakin tinggi di suatu perusahaan akan menunjukkan ETR yang rendah. Sehingga semakin tinggi juga biaya utang yang ditanggung oleh perusahaan. Jika *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan rendah maka akan berdampak pada tingkat ETR yang tinggi sehingga biaya utang yang ditanggung perusahaan akan semakin rendah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ke satu yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H1: *Tax avoidance* berpengaruh positif terhadap biaya utang

2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Utang

Ukuran perusahaan dapat menggambarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang besar akan lebih banyak menggunakan utang dibandingkan dengan perusahaan dalam lingkup kecil. Hal tersebut dikarenakan perusahaan besar akan dengan mudah mendapatkan pinjaman jika dibandingkan dengan perusahaan kecil. Total aset yang semakin besar pada suatu perusahaan besar diharapkan di masa yang

akan datang akan mempunyai kemampuan yang besar juga dalam melunasi kewajibannya (Ashkhabi 2015).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ashkhabi (2015) menemukan jika ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap biaya utang. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis ke dua yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap biaya utang.

2.3.3 Pengaruh Struktur Kepemilikan Keluarga terhadap Biaya Utang

Faktor yang berpengaruh terhadap biaya utang salah satunya yaitu struktur kepemilikan keluarga. Kepemilikan keluarga merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki baik oleh individu maupun perusahaan yang bukan publik (Faccio dan Lang, 2002 dalam kamiliah et.al.,2013:5) pada (Swissia 2018). Perusahaan yang mempunyai kepemilikan saham terkonsentrasi biasanya ditemukan pada perusahaan milik keluarga yang secara mayoritas saham perusahaan tersebut telah dikuasi oleh keluarga tertentu (Rebecca 2013).

Perusahaan dengan proporsi kepemilikan saham keluarga yang lebih besar, akan mendapatkan kepercayaan kepada pihak kreditur dalam peminjaman sumber dana. Pihak kreditur memandang bahwa perusahaan dengan saham mayoritas yang dimiliki oleh keluarga akan dapat mengembalikan pinjaman di periode yang akan datang. Hal tersebut dikarenakan pihak keluarga yang memiliki saham mayoritas di perusahaan bertindak tidak hanya sebagai pemegang saham tetapi

sebagai pihak yang mengelola perusahaan. Sehingga perusahaan dengan mayoritas saham yang dimiliki oleh keluarga cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dari pada yang dikelola oleh pihak eksternal.

Penelitian yang dilakukan oleh Perdana dan Kusumastuti (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan positif terhadap biaya utang. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ke tiga yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H3 : Struktur kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap biaya utang.

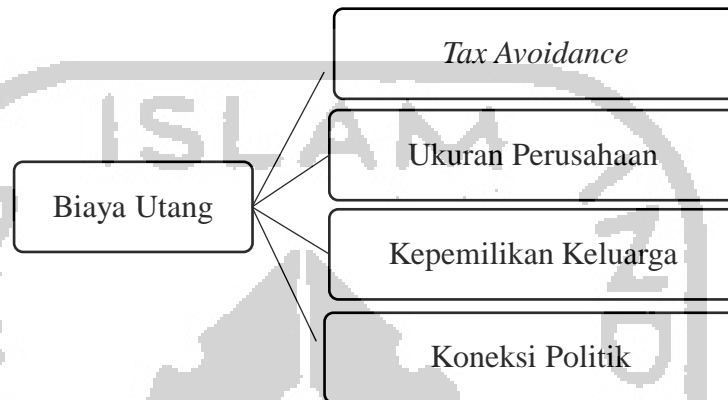
2.3.4 Pengaruh Koneksi Politik terhadap Biaya Utang

Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap biaya utang yaitu koneksi politik. Koneksi politik merupakan hubungan antara perusahaan dengan Pemerintah dengan adanya tujuan yang sama untuk memperoleh keuntungan. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2013) menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan positif terhadap koneksi politik dengan biaya utang. Hal tersebut dikarenakan perusahaan dengan struktur kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah dengan proporsi yang lebih besar akan lebih dipercaya oleh pihak kreditur. Sehingga perusahaan diharapkan dapat mampu mengembalikan pinjaman pada periode berikutnya karena pemerintah menjadi pemegang saham mayoritas pada perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ke empat yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H4 : Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap biaya utang.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hipotesis yang telah dijelaskan, maka peneliti membuat kerangka pemikiran yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran